

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 30 Juni 2023 adalah

sebagai berikut:

🚩 Kepala Perwakilan	: Beligan Sembiring
🚩 Kepala Bagian Tata Usaha	: Abd. Wahab
🚩 Koordintor Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat	: Setiawan Wahyudiyono
🚩 Koordinator Pengawasan Bidang APD	: Glenn Davies Siwu
🚩 Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara	: Harri Mustari
🚩 Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi	: Patardo H. Nainggolan
🚩 Koordinator Pengawasan Bidang P3A	: Rudy Siswanto
🚩 Subkoordinator Kepegawaian	: Frolie Frelin Toar
🚩 Subkoordinator Keuangan	: Donald
🚩 Subkoordinator Umum	: Muhammad Welkom

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari modul Administrasi, Aset Tetap, Bendahara, GL dan Pelaporan, Komitmen, Pembayaran, Penganggaran, Persediaan dan Report. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung

dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

- peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna

menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

**Penyusutan Aset
Tetap**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Capaian *Output* Strategis Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Capaian *Output* Strategis selama Semester I Tahun Anggaran 2023 yang telah dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara adalah:

1. Program Pengawasan Pembangunan

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	% Penyerapan	Ta rg et	R V K	Progres Capaian Output
1	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/ Daerah	88.206.000	278.585.967	31,51%	22	16	49,79%
2	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	137.500.000	21.801.500	15,86%	2	2	49,79%
3	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	416.400.000	200.060.246	48,05%	5	5	49,79%
4	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	145.900.000	86.465.000	59,26%	4	2	49,79%
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	307.410.000	165.973.250	53,99%	9	5	49,79%
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	413.146.000	105.906.004	25,63%	8	6	49,79%

7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	414.800.000	78.728.626	18,98%	6	6	49,79%
8	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	75.600.000	31.208.000	41,28%	2	1	49,79%
9	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	52.700.000	31.920.700	60,57%	2	2	49,79%
10	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	797.136.000	121.351.825	15,22%	10	5	49,79%
11	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	48.270.000	18.502.960	38,33%	4	4	49,79%

2. Program Dukungan Manajemen

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Tar get	R V K	Progres Capaian Output
1	EBA.962	Layanan Umum	678.070.000	235.300.566	34,70%	1	1	49,98%
2	EBA.994	Layanan Perkantoran	17.187.060.000	9.271.305.414	53,94%	1	1	49,98%

3	EBB.951	Layanan Sarana Internal	307.818.000	85.400.000	27,74%	38	14	86,31%
---	---------	-------------------------	-------------	------------	--------	----	----	--------

A.7. Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui Program Prioritas Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, kegiatan Prioritas Nasional VII dengan pagu mencapai Rp2.056.952.000,00 dan realisasi sebesar Rp553.591.365,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan	TARGET	CAPAIAN	%
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembagunan Sumber Daya Manusia	307.410.000	165.973.250	53,99	Lap	9	5	49,79
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	413.146.000	105.906.004	25,63	Lap	8	6	49,79

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	414.800.000	78.728.626	18,98	Lap	6	6	49,79
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	75.600.000	31.208.000	41,28	Lap	2	1	49,79
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	52.700.000	31.920.700	60,57	Lap	2	2	49,79
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	797.136.000	121.351.825	15,22	Lap	10	5	49,79
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	48.270.000	18.502.960	38,33	Lap	4	4	49,79

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Semester I Tahun 2023 semula sebesar Rp25.346.328.000,00 dan beberapa kali dilakukan revisi menjadi Rp21.866.016.000,00. Adapun revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai, penambahan belanja barang dan modal pada fasilitas dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian pagu Pendapatan dan Belanja Perwakilan BPKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	17.952.422.000	7.306.906.000	87.000.000	25.346.328.000
Optimalisasi dari Belanja Pegawai	14.055.720.000	7.502.478.000	307.818.000	21.866.016.000
Anggaran Akhir	14.055.720.000	7.502.478.000	307.818.000	21.866.016.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen	21.848.832.000	18.172.948.000
Program Pengawasan Pembangunan	3.497.496.000	3.693.068.000
Total	25.346.328.000	21.866.016.000

Pendapatan Negara dan Hibah
Rp14.748.144,00

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp14.748.144,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Realisasi PNBP Lainnya Semester I Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp541.783,00 atau 3,54 persen dibandingkan realisasi PNBP Tahun 2022 sebesar Rp15.289.927,00 disebabkan penurunan pendapatan atas sewa rumah dinas pegawai yang mutasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Perbandingan realisasi PNBP Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2023 dan 2022

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.748.144	15.289.927	(541.783)	(3,54)
Total	14.748.144	15.289.927	(541.783)	(3,54)

Belanja Negara
Rp10.719.734.011,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Semester I Tahun 2023 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp10.719.734.011,00 atau 49,02 persen dari anggaran sebesar Rp21.866.016.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Semester I Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2023

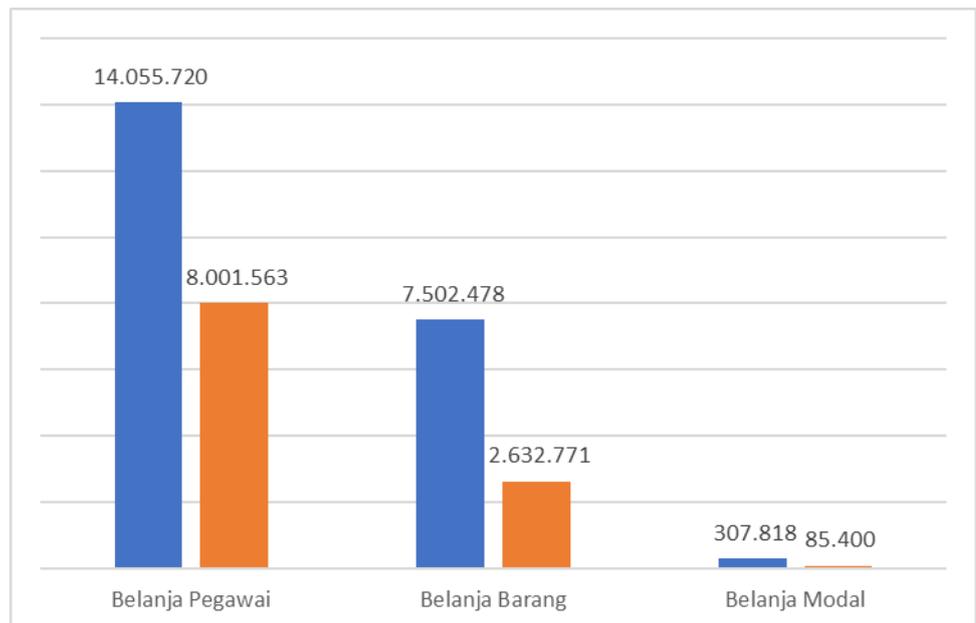
Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
CH	Program Pengawasan Pembangunan	3.693.068.000	1.140.504.078	30,88
WA	Program Dukungan Manajemen	18.172.948.000	9.579.229.933	52,71
Jumlah		21.866.016.000	10.719.734.011	49,02

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2023

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	14.055.720.000	8.001.562.904	56,93
52	Belanja Barang	7.502.478.000	2.632.771.107	35,09
53	Belanja Modal	307.818.000	85.400.000	27,74
Jumlah		21.866.016.000	10.719.734.011	49,02

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja semester I Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.260.966.675,00 atau 13,33% dibandingkan realisasi belanja Tahun 2022 pada periode yang sama disebabkan adanya kenaikan tarif tunjangan kinerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2023 dan kenaikan belanja barang seiring dengan bertambahnya penugasan pengawasan.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun 2023 dan 2022

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	8.001.562.904	7.266.104.561	735.458.343	10,12
52	Belanja Barang	2.632.771.107	2.192.662.775	440.108.332	20,07
53	Belanja Modal	85.400.000	-	85.400.000	-
	Total	10.719.734.011	9.458.767.336	1.260.966.675	13,33

Belanja Pegawai
Rp8.001.562.904,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp8.001.562.904,00 dan Rp7.266.104.561,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.717.445.000	3.792.192.040	56,45
Belanja Lembur	397.740.000	160.568.000	40,37
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	6.940.535.000	4.048.802.864	58,34
Total	14.055.720.000	8.001.562.904	56,93

Realisasi belanja pegawai (*netto*) sebesar Rp8.001.562.904,00 berasal dari belanja pegawai (*bruto*) sebesar Rp8.014.338.951,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp12.776.047,00.

Dibandingkan dengan realisasi Semester I Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp735.458.343,00 atau 10,12 persen disebabkan adanya kenaikan tarif tunjangan kinerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2023.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.792.192.040	3.440.950.068	351.241.972	10,21
Belanja Lembur	160.568.000	101.528.000	59.040.000	58,15
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	4.048.802.864	3.723.626.493	325.176.371	8,73
Total	8.001.562.904	7.266.104.561	735.458.343	10,12

Belanja Barang
Rp2.632.771.107,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp2.632.771.107,00 dan Rp2.192.662.775,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Semester I Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.526.498.000	591.936.057	38,78
Belanja Barang Non Operasional	132.090.000	24.512.531	18,56
Belanja Barang Persediaan	322.772.000	113.990.760	35,32
Belanja Jasa	387.535.000	151.187.436	39,01
Belanja Pemeliharaan	834.243.000	387.244.884	46,42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.299.340.000	1.363.899.439	31,72
Total	7.502.478.000	2.632.771.107	35,09

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp2.632.771.107,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp2.632.771.107,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00.

Dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2022, terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp440.108.332,00 atau 20,07 persen antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja perjalanan dinas dalam negeri yang disebabkan adanya tambahan penugasan dan kenaikan belanja barang non operasional. Perbandingan realisasi Belanja Barang Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	591.936.057	555.542.705	36.393.352	6,55
Belanja Barang Non Operasional	24.512.531	3.400.000	21.112.531	620,96
Belanja Barang Persediaan	113.990.760	94.131.000	19.859.760	21,10
Belanja Jasa	151.187.436	111.361.097	39.826.339	35,76
Belanja Pemeliharaan	387.244.884	234.247.768	152.997.116	65,31
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.363.899.439	1.193.980.205	169.919.234	14,23
Total	2.632.771.107	2.192.662.775	440.108.332	20,07

Belanja Modal
Rp85.400.000,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp85.400.000,00 dan Rp0,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2023 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	307.818.000	85.400.000	27,74
Total	307.818.000	85.400.000	27,74

Dibandingkan dengan realisasi Semester I Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp85.400.000,00 atau 100 persen antara lain disebabkan adanya peningkatan kebutuhan perangkat pengolah data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Perbandingan realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.400.000	-	85.400.000	100
Total	85.400.000	-	85.400.000	100

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp85.400.000,00 telah dicatat sebagai perolehan Aset Tetap dengan Rincian sebagai berikut:

Nama Aset Tetap	Jumlah (Rp)
Peralatan dan Mesin	85.400.000
Total	85.400.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp269.791.957,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp269.791.957,00 dan Rp198.493.457,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Lancar	30 Jun 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	120.000.000	-
2	Piutang Bukan Pajak	2.699.016	-
4	Persediaan	147.092.941	198.493.457
	Total	269.791.957	198.493.457

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp120.000.000,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	30 Juni 2023 (Rp)
1	Uang Tunai di Brankas Bendahara	5.538.200
2	Uang di Rekening Bank Bendahara	14.778.809
3	Uang Muka/ <i>Voucher</i>	-
4	Kuitansi UP yang belum di SP2D-kan	99.683.000
5	Selisih Kas	(9)
	Jumlah	120.000.000

Piutang Bukan Pajak
Rp2.699.016,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.699.016,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak tersebut telah seluruhnya diterima s.d 30 Juni 2023 merupakan piutang atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa rumah dinas yang dipotong dari pembayaran gaji pegawai.

Persediaan
Rp147.092.941,00

C.1.3. Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp147.092.941,00 dan Rp198.493.457,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis Persediaan	30 Jun 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	124.043.187	170.807.125
Bahan Untuk Pemeliharaan	10.501.000	8.235.500
Persediaan Lainnya	12.548.754	19.450.832
Jumlah	147.092.941	198.493.457

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp47.312.235.220,00

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp47.312.235.220,00 dan Rp47.797.461.504,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	30 Jun 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Tanah	35.503.956.000	35.503.956.000
2	Peralatan dan Mesin	7.812.670.839	7.727.270.839
3	Gedung dan Bangunan	13.383.709.775	13.383.709.775
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	467.474.650	467.474.650
5	Aset Tetap Lainnya	42.808.900	42.808.900
Nilai Perolehan		57.210.620.164	57.125.220.164
7	Akumulasi Penyusutan	(9.898.384.944)	(9.327.758.660)
Nilai Buku		47.312.235.220	47.797.461.504

Tanah
Rp35.503.956.000,00

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki BPKP per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp35.503.956.000,00 dan Rp35.503.956.000,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	35.503.956.000
Mutasi Tambah:	
- Hibah	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Buku per 30 Juni 2023	35.503.956.000

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, tidak terdapat mutasi atas tanah. Rincian Tanah per 30 Juni 2023 dapat dilihat pada Lampiran.

Peralatan dan Mesin
Rp7.812.670.839,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.812.670.839,00 dan Rp7.727.270.839,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 sebesar Rp6.428.926.462,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp1.383.744.377,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7.727.270.839
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	85.400.000
- Transfer Masuk	-
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
- Reklasifikasi Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	85.400.000
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	-
- Reklasifikasi Keluar	-
- Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	7.812.670.839
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(6.428.926.462)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	1.383.744.377

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp85.400.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	53.600.000
2	Peralatan Personal Komputer	12	31.800.000
Jumlah			85.400.000

Rincian dari Alat Rumah Tangga Lainnya yaitu berupa 2 unit TV serta Peralatan Personal Komputer berupa Printer sebanyak 12 unit.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp15.805.500,00.

Gedung dan
Bangunan
Rp13.383.709.775,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp13.383.709.775,00 dan Rp13.383.709.775,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 sebesar Rp3.255.600.083,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah Rp10.128.109.692,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	13.383.709.775
Mutasi Tambah:	
- Penyelesaian KDP	-
- Pengembangan Nilai Aset	-
- Pengembangan Melalui KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	-
- Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	13.383.709.775
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(3.255.600.083)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	10.128.109.692

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp467.474.650,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp467.474.650,00 dan Rp467.474.650,00. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp202.913.399,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp264.561.251,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	467.474.650
Mutasi Tambah:	
- Pengembangan KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	-
- Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	467.474.650
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	202.913.399
Nilai Buku per 30 Juni 2023	264.561.251

Aset Tetap Lainnya
Rp42.808.900,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp42.808.900,00 dan Rp42.808.900,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 sebesar Rp10.945.000,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp31.863.900,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	42.808.900
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar / Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	42.808.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(10.945.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	31.863.900

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp9.898.384.944,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp9.898.384.944,00 dan Rp9.327.758.660,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	35.503.956.000	-	35.503.956.000
2	Peralatan dan Mesin	7.812.670.839	(6.428.926.462)	1.383.744.377
3	Gedung dan Bangunan	13.383.709.775	(3.255.600.083)	10.128.109.692
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	467.474.650	(202.913.399)	264.561.251
5	Aset Tetap Lainnya	42.808.900	(10.945.000)	31.863.900
	Total	57.210.620.164	(9.898.384.944)	47.312.235.220

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Saldo per 30/06/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Peralatan dan Mesin	(6.145.310.654)	(6.428.926.462)	(283.615.808)	(283.615.808)	-
2	Gedung dan Bangunan	(2.974.730.386)	(3.255.600.083)	(280.869.697)	(280.869.697)	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(196.772.620)	(202.913.399)	(6.140.779)	(6.140.779)	-
4	Aset Tetap Lainnya	(10.945.000)	(10.945.000)	-	-	-
	Total	(9.327,758.660)	(9.898.384.944)	(570.626.284)	(570.626.284)	-

Aset Lainnya
Rp0,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	30 Jun 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	64.638.000	64.638.000
	Nilai Perolehan	64.638.000	64.638.000
4	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(64.638.000)	(64.638.000)
	Nilai Buku	-	-

Aset Tak Berwujud
Rp64.638.000,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp64.638.000,00 dan Rp64.638.000,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 sebesar Rp64.638.000,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa *Software* dan lisensi.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	64.638.000
Mutasi Tambah:	
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	64.638.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(64.638.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	-

**Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya**
(Rp64.638.000,00)

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp64.638.000,00 dan Rp64.638.000,00. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Saldo per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri atas:

No	Uraian	30 Jun 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(64.638.000)	(64.638.000)
	Total	(64.638.000)	(64.638.000)

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/ 2022 (Rp)	Saldo per 30/06/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(64.638.000)	(64.638.000)	-	-	-
	Total	(64.638.000)	(64.638.000)	-	-	-

**Kewajiban Jangka
Pendek**
Rp1.480.055.970,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.480.055.970,00 dan Rp91.416.304,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	30 Jun 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	1.260.372.970	84.002.132
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	99.683.000	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	-	7.414.172
4	Uang Muka dari KPPN	120.000.000	-
	Total	1.480.055.970	91.416.304

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp1.260.372.970,00

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.260.372.970,00 dan Rp84.002.132,00. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	30 Jun 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	1.189.030.470	54.026.000
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	71.342.500	29.976.132
	Total Utang Kepada Pihak Ketiga	1.260.372.970	84.002.132

Rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.189.030.470
2.	Belanja Uang Makan PNS	-
	Total	1.189.030.470

Rincian belanja barang yang masih harus dibayar per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	71.342.500
	Total	71.342.500

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0,00

C.4.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.414.172,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang diterima terlebih dahulu.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023

No	Obyek Sewa	Jangka Waktu (Periode)	Nilai Sewa (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2023 (Rp)
1	ATM BRI	3 tahun (1/7/2020 s.d. 30/6/2023)	44.485.000	-
	Total		44.485.000	-

*Uang Muka dari
KPPN
Rp120.000.000,00*

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Ekuitas
Rp46.101.971.207,00*

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp46.101.971.207,00 dan Rp47.904.538.657,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
(Rp12.526.277.380,00)*

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp12.526.277.380,00 dan minus Rp11.289.162.490,00. Jumlah Tahun 2023 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp24.861.332,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp12.551.138.712,00.

*Pendapatan
Operasional
Rp24.861.332,00*

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.861.332,00 dan Rp25.224.753,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp24.861.332,00*

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.861.332,00 dan Rp25.224.753,00. Penurunan PNBP tersebut dikarenakan adanya penurunan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang berasal dari sewa rumah dinas pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian PNBP Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	24.861.332	25.224.753	(363.421)	1,44
Total	24.861.332	25.224.753	(363.421)	1,44

Jika realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp10.113.188,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional
Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	24.861.332	14.748.144	10.113.188
Total	24.861.332	14.748.144	10.113.188

Selisih Pendapatan Operasional menurut LO dan LRA sebesar Rp10.113.188,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan tahun 2023 yang belum diterima	2.699.016
Pendapatan diterima s.d 2023 untuk masa pemanfaatan tahun 2022	7.414.172
Total	10.113.188

Beban Operasional
Rp12.551.138.712,00

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.551.138.712,00 dan Rp11.314.387.243,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21
Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	9.136.567.374	8.440.497.674	696.069.700	8,24
Beban Persediaan	143.595.776	133.671.807	9.923.969	7,42
Beban Barang dan Jasa	827.726.455	719.950.052	107.776.403	14,97
Beban Pemeliharaan	409.040.384	240.125.268	168.915.116	70,34
Beban Perjalanan Dinas	1.463.582.439	1.244.283.191	219.299.248	17,62
Beban Penyusutan dan Amortisasi	570.626.284	535.859.251	34.767.033	6,48
Total	12.551.138.712	11.314.387.243	1.236.751.469	10,93

Beban Pegawai
Rp9.136.567.374,00

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.136.567.374,00 dan Rp8.440.497.674,00. Kenaikan Beban Pegawai tersebut dikarenakan adanya kenaikan tarif tunjangan

kinerja berdasarkan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2023.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	4.168.841.666	4.323.221.986	(154.380.320)	(3,57)
Beban Lembur	160.568.000	101.528.000	59.040.000	58,15
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	4.807.157.708	4.015.747.688	791.410.020	19,70
Total	9.136.567.374	8.440.497.674	696.069.700	8,24

Jika realisasi LO Semester I Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp1.135.004.423,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	4.168.841.666	3.792.192.087	376.649.579
Beban Lembur	160.568.000	160.568.000	-
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	4.807.157.708	4.048.802.864	758.354.844
Total	9.136.567.374	8.001.562.951	1.135.004.423

Selisih realisasi menurut LO dan LRA sebesar Rp1.135.004.423,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pembayaran gaji Juli 2023 yang masih harus dibayarkan	376.649.579
Pembayaran tunjangan kinerja bulan Juli yang masih harus dibayarkan	758.354.844
Total	1.135.004.423

Beban Persediaan
Rp143.595.776,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp143.595.776,00 dan Rp133.671.807,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Kenaikan Beban Persediaan tersebut dikarenakan adanya penambahan jumlah penugasan pengawasan yang menyebabkan kenaikan belanja barang persediaan barang konsumsi di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	136.009.698	105.096.500	30.913.198	29,41
Beban Persediaan Lainnya	7.586.078	28.575.307	(20.989.229)	(73,45)
Total	143.595.776	133.671.807	9.923.969	7,42

Realisasi Belanja Barang Persediaan Tahun 2023 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp113.990.760,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp143.595.776,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Barang Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Tahun 2023.

Beban Barang dan Jasa
Rp827.726.455,00

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp827.726.455,00 dan Rp719.950.052,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Kenaikan Beban Barang dan Jasa tersebut dikarenakan terdapat peningkatan belanja keperluan perkantoran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	663.278.557	605.188.955	58.089.602	9,60
Beban Barang Non Operasional	24.512.531	3.400.000	21.112.531	620,96
Beban Jasa	139.935.367	111.361.097	28.574.270	25,66
Total	827.726.455	719.950.052	107.776.403	14,97

Jika realisasi LO Semester I Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp60.090.431,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	663.278.557	591.936.057	71.342.500
Beban Barang Non Operasional	24.512.531	24.512.531	-
Beban Jasa	139.935.367	151.187.436	(11.252.069)
Total	827.726.455	767.636.024	60.090.431

Selisih realisasi Beban Barang Operasional sebesar Rp71.342.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	71.342.500
Total	71.342.500

Selisih realisasi Beban Jasa sebesar minus Rp11.252.069,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran langganan daya dan jasa s.d. tahun 2023 atas beban yang terutang tahun 2022	(11.252.069)
Total	(11.252.069)

Beban
Pemeliharaan
Rp409.040.384,00

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp409.040.384,00 dan Rp240.125.268,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Kenaikan Beban Pemeliharaan tersebut dikarenakan terdapat kenaikan beban pemeliharaan seiring dengan peningkatan kebutuhan pemeliharaan aset di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	266.076.844	153.858.100	112.218.744	72,94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121.168.040	80.389.668	40.778.372	50,73
Beban Persediaan Pemeliharaan	21.795.500	5.877.500	15.918.000	270,83
Total	409.040.384	240.125.268	168.915.116	70,34

Jika realisasi LO Semester I Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp2.358.852,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 28 berikut ini:

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan
Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	266.076.844	366.076.844	(100.000.000)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121.168.040	40.604.688	80.563.352
Belanja Persediaan Pemeliharaan	21.795.500	-	21.795.500
Total	409.040.384	406.681.532	2.358.852

Realisasi Belanja Persediaan Pemeliharaan Tahun 2023 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp406.681.532,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp409.040.384,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan sampai dengan Semester I Tahun 2023.

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.463.582.439,00

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.463.582.439,00 dan Rp1.244.283.191,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas tersebut dikarenakan terdapat penambahan tugas pengawasan yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2023.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 29 berikut ini:

Tabel 29
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	1.323.482.439	1.103.403.191	220.079.248	19,95
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.100.000	105.300.000	34.800.000	33,05
Total	1.463.582.439	1.244.283.191	219.299.248	17,62

Jika realisasi LO Semester I Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp99.683.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 30 berikut ini:

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Perjalanan Biasa	1.323.482.439	1.230.249.439	93.233.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.100.000	133.650.000	6.450.000
Total	1.463.582.439	1.363.899.439	99.683.000

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp570.626.284,00

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp570.626.284,00 dan Rp535.859.251,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut dikarenakan terdapat penambahan aset dalam bentuk peralatan dan mesin pada periode Semester I Tahun 2023 dan gedung dan bangunan pada akhir tahun 2022 serta masa manfaat software yang telah habis pada periode Semester I Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 31 berikut ini:

Tabel 31
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	283.615.808	248.662.858	34.952.950	14,06
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	280.869.697	272.975.864	7.893.833	2,89
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.140.779	6.140.779	-	-
Beban Amortisasi Software	-	8.079.750	(8.079.750)	(100,00)
Total	570.626.284	535.859.251	34.767.033	6,48

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp0,00

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar
Rp0,00

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp0,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Rp0,00

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional.

*Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp0,00*

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 sebesar Rp0,00 merupakan nilai buku aset yang dihapus pada tanggal neraca karena adanya pelepasan hak atas aset tersebut sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan pos-pos neraca.

*Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp0,00*

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp0,00 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

*Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp0,00*

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp0,00*

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp47.904.538.657,00

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp47.904.538.657,00 dan Rp48.072.519.568,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp12.526.277.380,00)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp12.526.277.380,00 dan Rp11.289.162.490,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Koreksi Yang Menambah/ (Mengurangi) Ekuitas
Rp18.724.063,00

E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp18.724.063,00 dan Rp0,00. Jumlah per 30 Juni 2023 dan 2022 tersebut terdiri atas:

Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Lain – lain	18.724.063	-
Total	18.724.063	-

Lain-Lain
Rp18.724.063,00

E.4. Lain-Lain

Jumlah Lain-Lain per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.724.063,00 dan Rp0,00. Jumlah Lain-Lain tersebut merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan beban tagihan listrik dan telepon Desember 2021 yang dicatat di Januari 2022 pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Transaksi Antar Entitas
Rp10.704.985.867,00

E.5. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.704.985.867,00 dan Rp9.443.477.409,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023 dan 2022, terdiri atas:

Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.719.734.011	9.458.767.336
Diterima dari Entitas Lain	(14.748.144)	(15.289.927)
Total	10.704.985.867	9.443.477.409

*Ditagihkan ke Entitas
Lain
Rp10.719.734.011,00*

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.719.734.011,00 dan Rp9.458.767.336,00. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 30 Juni 2023.

*Diterima dari Entitas
Lain
(Rp14.748.144,00)*

E.5.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp14.748.144,00 dan minus Rp15.289.927,00. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian pendapatan sampai dengan 30 Juni 2023 .

*Ekuitas Akhir
Rp46.101.971.207,00*

E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp46.101.971.207,00 dan Rp46.226.834.487,00. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp47.582.027.177,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp1.480.055.970,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

*Biaya Bantuan
Kedinasan
Rp77.285.000,00*

F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan

Selama periode Semester I Tahun 2023 kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing satuan kerja, yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, jumlah penugasan yang dibiayai mitra kerja sebanyak 6 penugasan dan menghasilkan 6 LHP. Adapun realisasi biaya bantuan kedinasan dari mitra kerja sebesar Rp77.285.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Korwas	Jumlah Penugasan	Jumlah LHP	Jumlah Dana (Rp)
Korwas IPP (Perekonomian)	-	-	-
Korwas IPP (Polhukam)	-	-	-
Korwas APD	-	-	-
Korwas AN	2	2	19.750.000
Korwas Investigasi	-	-	-
Korwas P3A	4	4	57.535.000
Jumlah	6	6	77.285.000

Biaya Bantuan Kedinasan seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Berdasarkan penugasan dari pimpinan unit kerja masing-masing berupa SK Tim Gabungan/Surat Tugas maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja. Pada akhir kegiatan/penugasan, pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi biaya perjalanan dinas/honorarium, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.